

BAB 5

PENUTUP

Besarnya upah mencerminkan bagaimana kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Tingkat upah setiap daerah juga berbeda karena adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap rata-rata upah di Indonesia Timur. Pendidikan pada penelitian ini diukur dari porsi pekerja dengan pendidikan tinggi yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas), Diploma dan Universitas. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari faktor-faktor penentu tingkat upah yaitu usia, inflasi dan infrastruktur. Menurut teori, pendidikan memegang peran penting dalam menentukan kualitas angkatan kerja yang akan berpengaruh pada produktivitas dan pendapatan. Metode yang digunakan adalah *Panel Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat hubungan antara upah dan pendidikan berdasarkan hasil estimasi *Panel Least Square* (PLS), dimana pendidikan memengaruhi upah rata-rata secara positif. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan pendidikan dan upah di Indonesia Timur sesuai dengan teori *human capital*. Teori tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan dapat terjadi akibat adanya peningkatan pendidikan. Jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi di wilayah di Indonesia Timur dapat menjadi penyebab perbedaan upah. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya pekerja dengan pendidikan tinggi di suatu wilayah akan memengaruhi produktivitas di wilayah tersebut. Produktivitas tersebut berkaitan dengan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa serta dicerminkan oleh upah yang diterima. Kualitas sumber daya manusia yang baik, yang ada di setiap wilayah akan memengaruhi output yang dihasilkan. Dengan demikian, banyaknya pekerja yang berpendidikan tinggi di Indonesia Timur ini, akan mampu menggali serta mengembangkan faktor-faktor *endowment* yang dimiliki untuk mencapai efisiensi dalam proses produksi.

- Faktor-faktor penentu tingkat upah seperti proporsi jumlah penduduk usia produktif, inflasi, dan kondisi infrastruktur dapat memengaruhi rata-rata upah di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Inflasi berpengaruh negatif terhadap rata-rata upah. Inflasi dapat mengakibatkan peningkatan pada upah sebagai bentuk penyesuaian dengan inflasi. Namun, pada penelitian ini inflasi memengaruhi rata-rata upah secara negatif dan tidak membuat upah meningkat seiring dengan peningkatan inflasi. Hal tersebut terjadi karena sebuah perusahaan mungkin melihat bahwa kenaikan inflasi memberikan *signal positif* dimana kenaikan harga akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada saat pendapatan perusahaan meningkat, maka perusahaan akan melakukan investasi berupa *business fixed investment* untuk proses produksi. Indonesia Timur yang identik dengan pertambangan lebih membutuhkan sejumlah alat berat dibandingkan pekerja. Akibatnya, upah rata-rata mengalami penurunan karena banyaknya pegawai yang di PHK dan lebih memilih untuk masuk ke sektor informal yang upahnya lebih rendah.

Usia berpengaruh negatif terhadap rata-rata upah. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan pekerja dengan kondisi fisik yang kuat dalam bekerja. Banyaknya penduduk dengan usia produktif dapat membuat tingkat upah meningkat karena penduduknya bekerja dengan efisien. Namun, pada penelitian ini banyaknya penduduk usia produktif membuat penurunan terhadap rata-rata upah. Tingginya penduduk usia produktif ini membuat tingginya angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan meningkatkan pengangguran khususnya Indonesia Timur yang minim akan lapangan pekerjaan. Indonesia Timur yang identik dengan pertambangan ini lebih membutuhkan mesin berat. Industri yang berbasis kapital yang berorientasi pada produktivitas terbukti tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja dikarenakan industri tersebut menggunakan teknologi padat modal. Dengan demikian, upah rata-rata juga akan mengalami penurunan akibat banyaknya pegawai yang di PHK dan lebih memilih untuk masuk ke sektor informal yang upahnya lebih rendah.

Infrastruktur berpengaruh positif terhadap rata-rata upah. Infrastruktur yang diwakili dengan panjang jalan memiliki dampak positif dalam meningkatkan investasi, mempermudah transaksi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses kepada lapangan kerja dan memunculkan kegiatan ekonomi. Dampak positif dari adanya kemudahan transaksi ini dicerminkan melalui peningkatan pendapatan. Pada penelitian ini peningkatan infrastruktur jalan di kawasan Indonesia Timur akan membuat upah rata-rata meningkat karena kegiatan ekonomi terlaksana dengan baik.

Adanya keterkaitan antara pendidikan dan rata-rata upah di Indonesia Timur dapat menjadi perhatian untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Hal tersebut diperlukan agar sumber daya manusia yang ada dapat menggali serta mengembangkan faktor-faktor *endowment* yang dimiliki untuk mencapai efisiensi dalam proses produksi dan memengaruhi tingkat upah yang ada.

Selain itu, adanya keterkaitan antara inflasi dan rata-rata upah di Indonesia Timur dapat menjadi pertimbangan bagi pihak berwenang yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi maupun inflasi. Berbagai pihak juga harus dapat menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan agar banyaknya penduduk dengan usia produktif atau angkatan kerja yang siap bekerja dapat memiliki pekerjaan.

Adanya keterkaitan antara infrastruktur dan upah rata-rata dapat menjadi pertimbangan bagi pihak berwenang, terutama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) agar lebih cepat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, bagi daerah tertinggal khususnya Indonesia Timur perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan terlebih dahulu agar memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penelitian ini. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan beberapa hal agar dapat memperbaiki serta menyempurnakan penelitian ini pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan data *time series* selama 5 tahun saja. Akan lebih baik jika menambah tahun dalam penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga untuk menambah beberapa variabel kontrol pada model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, B., Wahyuddin, & Trisnawati, R. (2012, Desember). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pada auditor sektor publik (pemerintah). *Jurnal Ekonomi Sumber Daya*, 13(2), 65-75.
- Arrozi, F., & Sutrisna, K. (2018, Desember). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(12), 2732-2763.
- Atmanti, H. D. (2005, Juli). Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30-39.
- Badan Pusat Geospasial. (2013). *Peta Wilayah Indonesia Timur*. Diambil kembali dari Geospasial untuk Negeri: <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Bali dalam Angka 2016*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Gorontalo dalam Angka 2016*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Maluku dalam Angka 2016*. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2016*. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2016*. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2016*. Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Papua Barat dalam Angka 2016*. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Papua dalam Angka 2016*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2016*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2016*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2016*. Palu: BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2016*. Kendari: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2016*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Bali dalam Angka 2018*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Maluku dalam Angka 2018*. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2018*. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2018*. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2018*. Kupang: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Papua Barat dalam Angka 2018*. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Papua dalam Angka 2018*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2018*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2018*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2018*. Palu: BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2018*. Kendari: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2018*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Bank Indonesia. (2018, Juli 31). *Pengenalan Inflasi*. Diambil kembali dari [bicara@bi.go.id](https://www.bi.go.id/bicara@bi.go.id): <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>
- Becker, G. (1975). *A Theoretical And Empirical Analysis With Special Reference To Education*. Chicago: Columbia University Press.
- Bhattacharai, K. (2017, Maret). Determinants of wages and labour supply in the UK. *Chinese Business Review*, 16(3), 126-140. doi:10.17265/1537-1506/2017.03.002
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics*. New York: Mc-GrowHill.
- Cadarajat, Y., Permata, M., & Prasmuko, A. (2008). *Apakah Kenaikan Upah Meningkatkan Inflasi?* Working Paper Bank Indonesia.
- Cahyono, B. (1998). *Tomat Budidaya dan Analisis Usaha Tani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011.

Economics Development Analysis Journal, 3(4). Diambil kembali dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

- DPR. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- DPR. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Haris, A. (2009). *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.
- Hidayah, W., Militina, T., & Ulfah, Y. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dan produk domestik regional bruto di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12(1). Diambil kembali dari <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Juwita, R., & Lestari, R. B. (2013, Maret 2). Kontribusi tingkat pendidikan terhadap pendapatan sektoral di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(2), 149-164.
- Kaufman, B., & Hotchkiss, J. (1999). *The Economics of Labor Markets. Fifth Edition*. The Dryden Press.
- Kemenprin. (2013, Juli 17). *Kenaikan Upah Sebaiknya Dihitung dari Inflasi*. Diambil kembali dari kemenperin.go.id: <https://kemenperin.go.id/artikel/6816/Kenaikan-Upah-Sebaiknya-Dihitung-dari-Inflasi>
- Kogit, M., Asid, R., Mulok, D., Lily, J., & Joganathan, N. (2011). Inflation-unemployment trade-off relationship in Malaysia. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(1), 100-108.
- Miki, M., & Yufal, F. (2011). Using education to reduce the wage gap between men and woman. *The Journal of Socio-Economics*, 40, 412-416.
- Moazzami, B. (1997). Regional wage convergence in Canada: an error-correction approach. *Canadian Journal of Regional Science Revue canadienne des sciences régionales*, XX(3), 341-350.
- Nasution, D. S. (2012, September). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat upah. *Ganeç Swara*, 6(2).
- Nihaya, D. M., & Kusumantoro. (2010, Maret). Penentu upah regional: tenaga kerja terdidik (skilled labor) dan tidak terdidik (unskilled labor) di Indonesia. *Jejak*, 3(1), 28-39.
- Nurjanah, S. (2014, Maret). Human capital dan peranan pemerintah dalam pendidikan. *EconoSains*, XII(1).
- Papua, P. P. (2016). *Harga Barang Mahal, Pemprov Papua Godok Kembali Kenaikan UMP*. Diambil kembali dari info@papua.go.id: <https://papua.go.id/view-detail-berita-3196/undefined>
- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. (2002). *Masa Depan Industri Pertambangan Menghadapi Realitas Baru : Prosiding Temu Profesi Tahunan XI*. Jakarta: PERHAPI.
- Sharma, S., & Sharma, P. (2017). Educational mismatch and its impact on earnings: evidence from Indian labour market. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1778-1795. doi:10.1108/IJSE-05-2016-0134

- Suhab, D. D. (2014). *Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dalam Konteks Kekinian*. Makassar: Puslitbang Kebijakan dan Manajemen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Sukwika. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Susanto, J. (2011, April). Pengaruh tingkat dan jenis pendidikan terhadap tingkat upah industri manufaktur. *Buletin Ekonomi*, 9(1), 1-82.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Dalam H. Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- Yetniwati. (2017, Februari). Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan. *Mimbar Hukum*, 29(1), 82-95.
- Zaeni, A. (2007). *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.